

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LI DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Imam Rezki Kurniadi
(imam_nofa@yahoo.com)

Pembimbing: Zulkarnaini, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-
Telp/Fak. 0761-63277

Abstract

This study aims to analyze the performance of Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the control of street vendors in the city of Pekanbaru and to analyze the factors that hinder the performance of the Civil Service Police Unit under the control of street vendors in the city of Pekanbaru. The method used in this study is a qualitative research method. Sources of data taken from several people related to the research include: municipal police officer, Head of the Control of Civil Service Police Unit, street vendors and Society. Data collection techniques using the technique of interview, observation, and documentation while the data analysis techniques used in this research is qualitative descriptive analysis.

Based on the survey results revealed that the implementation of performance Civil Service Police Unit in controlling street vendors in the city of Pekanbaru is still not optimal, it can be seen from the productivity achieved, the responsiveness of officers in the field to the solutions given to street vendors, as well as accountability or responsibility to solve the problem of street vendors Pekanbaru. While the factors that hinder the performance of the Civil Service Police Unit in Control of street vendors in the city of Pekanbaru, namely: 1. HR competency factors, is expected to the municipal police to increase the number of Civil Service Police Unit personnel in anticipation of the violations committed by violators of order and the quality is still very less so, 2. Factors limitations of infrastructure, the availability of infrastructure and budgetary Civil Service Police Unit were not enough and still very inadequate to carry out enforcement activities continuously and consistently, 3. Factors attendant attitude, the attitude of the civil service police unit officers yet can make the public can receive the information submitted. Ability to convey an appeal that is still lacking. The attitude of the officers also were still not mastered how to be a good way to the street vendors.

Keywords: Performance Civil Service Police Unit

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau, yang secara geografis berlokasi sangat strategis yakni terletak di perbatasan Negara tetangga

(Malaysia dan Singapura). Kondisi ini menyebabkan Kota Pekanbaru menjadi kota untuk mencari kehidupan yang lebih layak dan memiliki daya tarik tersendiri bagi berbagai kelompok. Hal ini sesuai dengan visi Kota Pekanbaru itu sendiri

yakni “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa”. Visi kota tersebut untuk dapat mewujudkannya tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang dimiliki kota ini. Penduduk menjadi sumber daya manusia yang paling berperan, karena penduduk merupakan aset bagi kota yang memberikan warna dan harapan serta ancaman jika tidak dikelola dengan baik.

Seiring dengan perkembangan kota penduduk Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BPS Kota Pekanbaru jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa, mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3.57%) ini berarti lebih tinggi apabila di bandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk secara nasional yakni 1,17% per tahun. Kondisi perkembangan penduduk Kota Pekanbaru. Kemudian di lihat menurut Kecamatan, wilayah dengan penduduk terpadat jika di hitung per km² adalah Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa/km², menyusul kecamatan Pekanbaru Kota yaitu sebanyak 11.885,84 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa/km². (Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2015)

Aktivitas perekonomian disuatu wilayah salah satunya ditandai dengan banyak sedikitnya fasilitas perekonomian yang terdapat di wilayah tersebut seperti pasar, pertokoan, kios dan sejenisnya. Tempat-tempat ini merupakan unsur penting dalam menunjang pemenuhan dalam kebutuhan hidup masyarakat. Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta di manfaatkan oleh

para pedagang sebagai tempat berusaha yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta. Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai pasar rakyat sebanyak 19 buah. Pasar rakyat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pasar tradisional dan pasar semi modern juga pasar modern. Dikarenakan perkembangan kota Pekanbaru semakin pesat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau di pindahkan dan pada umumnya berjualan di tempat-tempat umum seperti emperan toko, tepi-tepi jalan, di taman-taman dan di pasar-pasar. Lebih lanjut menurut Breman (1998) PKL merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Adapun ciri-ciri umum PKL yang dikemukakan oleh Kartono dkk (1980:3-7) yaitu: 1) merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen; 2) ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang); 3) menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran; 4) umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya; 5) kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar; 6) tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima; 7) dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman. Tempat penjualan PKL relatif

permanent yaitu berupa kios-kios kecil atau gerobak dorong, atau yang lainnya tanpa izin dari Pemerintah dan sering kali dipandang sebagai penyebab kesemrawutan kota.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2002 merupakan pihak yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan penertiban dan hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Namun pelaksanaan dari penertiban terkesan belum optimal, yang ditandai dari masih semrawutnya PKL di pasar. Selama ini yang menjadi persoalan utama dalam penelitian ini adalah kebijakan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.3: Jumlah Pelanggaran Ketertiban PKL di Kota Pekanbaru yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Penyelesaian
2011	828	1. Dimusnahkan
		2. Dipulangkan
		3. Diberi arahan
2012	1078	1. Ditangkap barang bukti
		2. Diberi arahan
		3. Surat pernyataan
		4. Didata
2013	303	1. Ditangkap barang bukti
		2. Diberi arahan
		3. Surat pernyataan
		4. Di data

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2015.

Dari data pelanggaran tersebut, dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 terjadi penertiban dari pelanggaran yang terjadi dan mengalami fluktuasi dengan kejadian terbesar pada tahun 2012 sebanyak 1078 kasus pelanggaran oleh PKL dan penyelesaian

yang dilakukan adalah ditangkap, diberi arahan, diberi surat pernyataan dan didata. Namun hal ini masih saja berulang kembali pada tahun 2013 dan terus saja berulang kejadian serupa.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkesan belum optimal karena PKL masih saja belum tertib. Semestinya dalam melaksanakan tugas penertiban umum Satpol PP Kota Pekanbaru harus berpedoman melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, namun pihak satpol PP dalam melaksanakan penertiban seperti halnya penertiban PKL lebih kepada berdasarkan instruksi dari pimpinan dengan di keluarkannya surat perintah tugas (SPT), dan indikasi tersebut menambah kurang jelasnya kinerja satpol PP dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka menjadi alasan mengapa dilakukan penelitian ini berkaitan dengan adanya indikasi bahwa Satpol PP masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu penulis tertarik mengangkat persoalan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru”.

A. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru?
2. Faktor apa saja yang menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berkaitan dengan perumusan masalah tersebut adalah:

- a. Untuk menganalisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis faktor yang menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, yakni dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik dan juga sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang akan datang yang meneliti persoalan yang sama.
- b. Secara praktis, yakni dalam rangka memberikan informasi bagi pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penertiban di Kota Pekanbaru.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Arikunto (2006:12) bahwa penelitian kualitatif menunjukkan pelaksanaan penelitian memang benar terjadi secara alamiah, apa adanya, serta menekankan pada penggambaran secara alami. Namun selain itu juga, penelitian ini juga mendasarkan pada data-data sekunder yang berupa angka-angka sebagai sumber informasi penting dalam analisis

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Pekanbaru untuk melihat bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dijadikan lokasi penelitian karena tugas penertiban umum merupakan tugas satuan polisi pamong praja sehingga dengan ditelitinya satuan ini dapat menjawab persoalan ketertiban umum khususnya PKL.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan data dan informasi pada peneliti, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata informan yang memberikan data dan informasi tentang bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pekanbaru melalui proses wawancara dan pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi penelitian melalui informan yang mengetahui permasalahan yang mendalam.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Petugas Satpol PP
- b. Kepala Bidang Operasional Pengendalian (Kabid OP) Satpol PP
- c. Pedagang
- d. Masyarakat

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang mana :

- a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan penulis langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

yaitu langsung dari informan yang menjadi objek penelitian, yakni data tentang bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui perpustakaan dan instansi atau kantor terkait dengan tujuan perolehan data seperti data dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

- a. Wawancara, adalah melakukan pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada informan dalam hal ini.
- b. Dokumentasi, adalah mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru
- c. Observasi, adalah pengamatan yang dilakukan di lapangan mengenai kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengamatan dilapangan. Semua informasi dikumpulkan dan dipelajari sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan menjadi satu kesatuan yang utuh yaitu hasil penelitian

HASIL

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangani Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL), dimana diketahui bahwa PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau di pindahkan dan pada umumnya berjualan di tempat-tempat umum seperti emperan toko, tepi-tepi jalan, di taman-taman dan di pasar-pasar. Adapun ciri-ciri umum PKL yaitu: 1) merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen; 2) ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang); 3) menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang kosumsi lainnya yang tahan lama secara eceran; 4) umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisis sebagai imbalan atas jerih payahnya; 5) kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar; 6) tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima; 7) dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan

setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

PKL selalu menjadi salah satu penyebab ketidaktertiban di masyarakat, hal ini dikarenakan pedagang berjualan tidak ditempat yang sudah dipersiapkan, seperti di trotoar jalan dan menyebabkan kemacetan. Kemudian juga PKL membuat pasar menjadi semerawut dan terkesan tidak tertib. Tugas penertiban diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana apabila dilihat dari pelaksanaan hasil kerja selama ini di Kota Pekanbaru dengan menggunakan lima indikator menurut Agus Dwiyanto dalam Mustapa (2013: 124-125) sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Produktivitas menggambarkan kemampuan Satpol PP untuk menghasilkan jumlah kegiatan penertiban yang sesuai dengan permintaan lingkungan dalam hal ini adalah sesuai dengan permintaan dari peraturan pemerintah akan upaya penertiban yang cenderung meresahkan masyarakat. Seberapa sering dilakukan kegiatan penertiban oleh satpol PP menunjukkan produktivitas hasil kerja yang mereka lakukan dalam rangka menjaga ketertiban di masyarakat.

Dari hasil wawancara mengenai produktivitas kinerja Satpol PP dilihat dari hasil wawancara mengenai kondisi ketertiban Kota Pekanbaru dari jawaban masyarakat menunjukkan bahwa kondisi ketertiban Kota Pekanbaru dari PKL terlihat kondusif ketika lagi ada kegiatan penertiban saja, ketika petugas sudah meninggalkan lokasi penertiban, PKL ini

satu per satu mulai berdatangan kembali. Hendaknya ada pengawasan yang berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan dengan pelanggaran, juga perlu di lakukannya patroli rutin oleh Satpol PP. Kondisi ini juga dapat dilihat dari PKL di sepanjang jalan HR. Soebrantas, menjelang malam banyak PKL yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas khususnya di depan hotel mona dan sekitarnya, ini sangat mengganggu pengendara yang melintas. Masyarakat mengharapkan PKL ini dapat segera di tertibkan, karena sangat mengganggu. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa produktivitas kinerja Satpol PP masih belum optimal dalam menertibkan PKL.

2. Kualitas Layanan

Kinerja organisasi pelayanan publik sangat terkait dengan kualitas layanan. Dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik yang tidak memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga muncul anggapan bahwa kinerja birokrasi sangat buruk dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

Kualitas layanan disini digambarkan dengan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam usaha mencapai hasil kerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penertiban yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan. Disini menunjukkan sampai berapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Ukuran kepuasan meliputi, sikap aparat dalam memberikan pelayanan, ketepatan waktu bagi masyarakat dan keluhan yang digunakan untuk menganalisis hasil yang telah dialami oleh masyarakat

3. Responsivitas

Responsivitas, adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Responsivitas dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk itu responsivitas diukur dari keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dalam hal ini responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas disini menjelaskan /mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

Responsibilitas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru akan dilihat dari pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu yakni kegiatan penertiban yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, berupa cepat menanggapi keluhan masyarakat dalam hal ketertiban umum

5. Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk atau mematuhi kehendak pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (*elected officials*). Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi apabila kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat.

Akuntabilitas dapat dilihat dari bagaimana pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil rakyat, serta keterbukaan dalam proses pelayanan serta data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab III diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah di lakukan analisis terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kota Pekanbaru diketahui bahwa pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kota Pekanbaru masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari produktivitas yang dicapai, responsivitas petugas dilapangan terhadap solusi masalah yang diberikan kepada PKL, serta akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk menyelesaikan masalah PKL di Kota Pekanbaru.
2. Faktor yang menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PKL di Kota Pekanbaru yaitu: 1. faktor kompetensi SDM, diharapkan kepada Satpol PP untuk meningkatkan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar ketertiban dan secara kualitas juga masih sangat kurang sekali, 2. Faktor keterbatasan sarana prasarana, ketersediaan untuk sarana prasarana dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang belum cukup dan masih sangat kurang memadai untuk melakukan kegiatan penertiban secara kontinue dan konsisten, 3. Faktor sikap petugas, sikap petugas satuan polisi pamong praja belum dapat membuat masyarakat dapat menerima informasi yang disampaikan. Kemampuan menyampaikan himbauan yang masih kurang. Sikap para petugas

juga yang masih kurang menguasai cara bagaimana bersikap yang baik kepada para PKL.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran dalam rangka analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Kepada Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan kinerja hal ini dapat dilihat dari produktivitas yang dicapai, responsivitas petugas dilapangan terhadap solusi masalah yang diberikan kepada pedagang, serta akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk menyelesaikan masalah PKL di Kota Pekanbaru.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dalam hal ini diwakilkan kepada Satpol PP dapat menambah jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja, menambah anggaran untuk sarana prasarana, juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada petugas sehingga tugas penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan dapat berjalan efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Amstrong, Mischael, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia..* Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Dessler, Gary. 1989. *Manajemen SDM (buku 1)*. Jakarta : Indeks

- Djarmiko, Yayat Hayati. 2003. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Dwiyanto, Agus dkk, 2002 . *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta. Bumi Aksara.
- Huseini & Lubis. 1987, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat antar ilmu-ilmu sosial UI.
- Jackson dkk, 1978. *Organizational Theory, A Macro Perspective for Management*, USA: Prentise-Hall.
- Kartono dkk, 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Katolik
- Keban, 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta: Makalah, Seminar Sehari, Fisipol UGM.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Martoyo, Susilo, 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Max Weber, 1994. *Menciptakan Model Tipe Ideal Birokrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mustopo, 2000, *Mewujudkan Good Governance dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Majalah Sinergi, STIA LAN
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Mondy W, and Noe. 1996. *Human Resource Management*. Jakarta: Group Gramedia.
- Nurlaila, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia I*. Jakarta. Lep Khair.
- Prawirosentono, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- Rivai, Vethzal & Basri. 2005. *Pefor mance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rue & Byars. 1995. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ruky, Ahmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti, 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: CV. Mandar Maju.

Siagian, Sondang. P. 2006, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simamora Hendri, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Rineka Cipta.

Stephen P. Robbins, 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Jakarta: Alih Bahasa.

Sugiyarti, Sri Riris, 2009. *Penilaian Kinerja Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik*. Jurnal-jurnal Ilmu Sosial, Unisisi Surakarta. Volume XXXII No.1 Juni.

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.

Sutarto, 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Thoha, Miftah 2002, *Administrasi Kepegawaian Daerah*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Tika, P. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

Wahjosumidjo, 2001. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widodo, MS Joko, 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia.

Winardi. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen-Dokumen

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang SATPOL PP dan juga Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang struktur organisasi SATPOL PP dan juga Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Teknis Daerah

BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka 2014

www.pekanbaru.go.id